

# ANALISIS EKONOMI PROPINSI GORONTALO

## Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah

**Imamudin Yuliadi**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

imamudin2006@yahoo.co.id.

**Heri Kurniawan Marpaung**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### ABSTRACT

*In the reformation era is signed by shifting role policy from central government to local government. South Sulawesi is one district at east Indonesia have so many potensial resources to increase the economic welfare. But in the other side they have several problem and constraint to utilize the natural and human resources. One of the main problem to promote east Indonesia economy is how to increase economic potential such as small business enterprise (SBE), informal economic sector, cooperative, agriculture, trade, and any others. Investment is the machine to generate the Indonesian economy. The policy to promote investment is caused with political will and public administration. To promote foreign and domestic investment in province south Sulawesi facing plenty of factor mainly social politic condition, sufficiently of economic infrastructure, employment and taxation problem, ect. Investment in south Sulawesi is also caused by consistenly interaction between local government and central government and among government institution. The aim of this research is to identify and analyse the potensial sector at province south Sulawesi. This research is identify and compare the impact of public policy to economic performance at province south Sulawesi. The research use multimethod analysis to answer the goals of this research. The conclusion of this research that there are several economic that have many constraint and problem. The main problem to promote economic performance at provinsi south Sulawesi mainly infrastructure, financial assestment, managerial skill, marketing, quality control and networking. The suggestion of this research is how to promote the condusive circumstance with comprehensive economic policy and also support with keeping social politic stability, sufficiently of economic infrastructure and the wholism policy between central and local government and others government institution.*

**Keywords:** *Investment disparity, decentralization policy, DAU, DAK.*

### LATAR BELAKANG MASALAH

Eforia otonomi daerah tidak terlepas dari pengalaman buruk rezim orde baru yang menerapkan strategi pembangunan ekonomi dan politik yang terpusat (*sentralisasi*). Atas nama pembangunan semua gejolak sosial politik akan berhadapan dengan aparat keamanan karena dapat mengganggu stabilitas politik sebagai prasyarat adanya pembangunan. Strategi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dengan menerapkan formula *trickle down effect* ternyata menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang semu. Kue pembangunan hanya dinikmati segelintir orang saja dan menyisakan banyak kemiskinan karena praktek monopoli dan

oligopolistik yang dipaksakan dan tanpa aturan main yang *fair*. Sistem pemerintahan yang sentralistis diyakini banyak ahli mengandung banyak kelemahan diantaranya :

1. Kebijaksanaan pemerintah dibuat lebih banyak oleh pusat yang biasanya memperlakukan daerah yang situasi dan kondisi lokalnya berbeda secara sama.
2. Volume dan beban pemerintah pusat secara teknis menjadi terlalu besar, berat dan kompleks sehingga kurang efisien dan efektif.
3. Kurang melibatkan dan mengembangkan potensi dan kemampuan lokal sehingga kurang memuaskan aspirasi dan harga diri yang bersifat lokal.

Cita-cita untuk mewujudkan tantangan pemerintahan, politik, ekonomi dan sosial yang lebih adil menemui momentumnya dengan berakhirnya orde baru setelah diterjang badai krisis moneter dan ekonomi yang cukup kuat. Semangat reformasi juga bergulir di seluruh pelosok tanah air yaitu dengan berkembangnya tuntutan otonomi daerah untuk meningkatkan peran dan wewenang daerah dalam mengelola potensi ekonominya.

### **Rumusan Masalah**

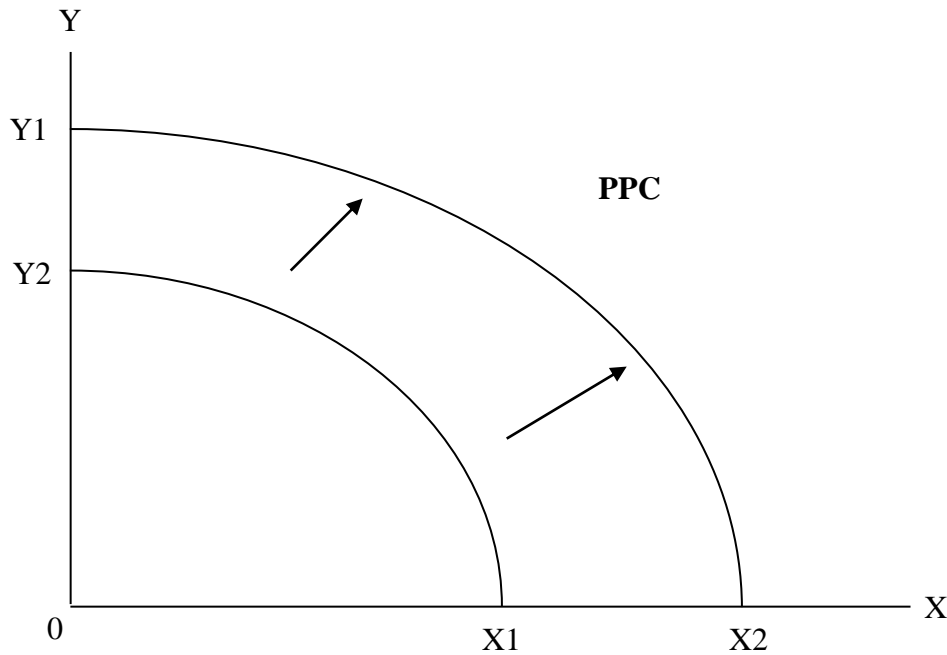
Secara spesifik permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh mana perkembangan investasi PMA/PMDN di provinsi Gorontalo yang menerapkan kebijakan pemekaran wilayah
2. Sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemekaran wilayah di provinsi Gorontalo terhadap kesenjangan investasi PMA/PMDN antar daerah
3. Sejauh mana pengaruh tingkat suku bunga dan nilai kurs rupiah terhadap investasi PMA/PMDN di provinsi Gorontalo dalam konteks perekonomian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) yang menerapkan kebijakan pemekaran wilayah
4. Sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemekaran wilayah di propinsi Gorontalo terhadap kesenjangan fiskal
5. Sejauh mana ancaman, peluang, kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh daerah yang menerapkan kebijakan pemekaran wilayah

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Studi Pustaka dan Tinjauan Teori**

Peranan investasi dalam perekonomian yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk dan penciptaan lapangan kerja. Melalui investasi maka kegiatan ekonomi dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Jadi investasi merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi bagi suatu perekonomian yang sedang membangun disamping faktor pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Kegiatan investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional yang digambarkan dengan pergeseran ke kanan atas kurva PPC sebagaimana digambarkan di bawah ini :



Penelitian tentang pentingnya peranan investasi dalam pembangunan ekonomi telah dilakukan oleh beberapa ahli ekonomi seperti yang dikemukakan Rostow mengenai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi (*the stages of economic growth*). Rostow mengemukakan bahwa perkembangan pembangunan ekonomi negara-negara melalui tahapan-tahapan pembangunan sebagai berikut yaitu tahap masyarakat tradisional, prasyarat tinggal landas, tahap lepas landas, menuju kedewasaan, masa konsumsi tinggi. Masa yang krusial bagi proses pembangunan suatu negara adalah pada tahap prasyarat tinggal landas menuju tahap lepas landas, karena pada masa itu merupakan proses pembentukan dasar-dasar pembangunan ekonomi yang akan menentukan tahap-tahap pembangunan berikutnya. Suatu negara dikatakan telah mencapai tahap lepas landas atau belum, manakala sudah memenuhi ciri-ciri berikut atau belum yaitu:

1. Berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5 % atau kurang menjadi 10 % dari produk nasional netto.
2. Berlakunya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
3. Terciptanya suatu rangka dasar politi, sosial dan institusional yang akan menciptakan menjadi kenyataan untuk perluasan sektor modern serta tumbuhnya sektor ekonomi eksternal sehingga proses pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut.

Kemudian pandangan *Ranis* dan *Fei* tentang teori pertumbuhan ekonomi juga mensyaratkan adanya kegiatan investasi agar tercapai pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Demikian juga dalam *teori Nelson* yang mensyaratkan adanya tingkat penanaman modal yang tinggi agar masyarakat dapat terlepas dari *the low level equilibrium trap*.

Studi dengan topik desentralisasi fiskal oleh *Richard M Bird* dan *Francois Vaillancourt* (1997) menyatakan bahwa ada tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan. Pertama, desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah. Kedua, delegasi berhubungan dengan suatu situasi yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama

pemerintah. Ketiga, devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan berada di daerah. Studi tentang penyaluran dana untuk investasi sosial yang dirancang dalam kerangka serupa di negara-negara Amerika Latin menyimpulkan bahwa penyaluran dana-dana seperti itu secara umum terbukti efektif karena:

1. Proyek-proyek tersebut digerakkan oleh kebutuhan nyata (*demand driven*) yang tentu saja membutuhkan keterlibatan lokal dalam derajat tinggi
2. Pengoperasiannya transparan sehingga memiliki akuntabilitas
3. Kelompok sasarannya direncanakan dengan hati-hati untuk kelompok berpenghasilan rendah
4. Pengoperasiannya relatif otonom biasanya dilakukan oleh manajer-manajer sektor swasta dan bebas dari banyak intervensi pejabat.

Penelitian yang dilakukan oleh *Roy W Bahl (1997)* tentang evaluasi dampak reformasi fiskal intrapemerintah di China menyatakan bahwa reformasi fiskal secara menyeluruh di China pada tahun 1994 mengubah struktur pajak-pajak penting, mengubah tanggung jawab administrasi perpajakan dan menyempurnakan pengaturan-pengaturan bagi hasil. Selain itu dilakukan pemangkasan kemampuan daerah untuk melakukan pendekatan-pendekatan dalam memobilisasi dana. Isu penting dari penelitian tersebut adalah porsi penerimaan daerah setelah pembagian menjadi bertambah besar. Ada beberapa alasan mengapa hal itu terjadi yaitu pertama, formula pembagian yang dilaksanakan tahun 1988 dapat dinegosiasikan untuk lebih menguntungkan pemerintah daerah. Kedua, kinerja ekonomi yang buruk dan bencana alam tidak memungkinkan pemerintah daerah untuk mencapai jumlah yang telah ditetapkan. Ketiga, pemerintah daerah menggunakan kewenangannya untuk memberikan konsesi pajak dan kontrak yang menguntungkan dan hal ini mengurangi aliran penerimaan ke pemerintah pusat.

*Richard M Bird dan Ariel Fiszbein (1996)* melakukan penelitian tentang peran pokok pemerintah pusat dalam desentralisasi fiskal di Kolumbia. Kunci untuk memahami hubungan fiskal intrapemerintahan di Kolumbia adalah sistem transfer intrapemerintahan. Sistem ini memiliki tiga elemen dasar yaitu *situado fiscal (SF)*, *participaciones municipales (PM)*, dan *sistema nacional de cofinanciacion (SNC)*. SF terdiri dari 24,5 % penerimaan rutin nasional di transfer ke departemen untuk membiayai pendidikan dan kesehatan. PM juga terdiri dari suatu persentase dari penerimaan rutin nasional yang meningkat secara tahunan ke tingkat maksimum 22 % ditransfer ke Dati II untuk investasi social atas dasar formula rumit yang secara keseluruhan berpihak pada Dati II yang lebih kecil dan lebih miskin. Sedangkan SNC memberikan pembiayaan atas proyek subnasional atas dasar dana pendamping berjumlah lebih dari 0,8 % dari PDB.

*Ernesto Rezk (1996)* melakukan penelitian tentang federalisme fiskal dan desentralisasi di Argentina. Desentralisasi pengeluaran terutama berlangsung melalui delegasi yang bersama konsentrasi pemungutan pajak yang demikian besar pada pusat menggiring derajat otonomi keuangan ke arah lebih kecilnya bagian subnasional dan pertanggungjawaban fiscalpun beralih tangan dikarenakan akuntabilitas yang melekat pada sumber penerimaan. Sistem bagi hasil merupakan mekanisme koordinasi pajak yang lebih disukai di Argentina tidak saja antara pusat dan provinsi tapi juga antara provinsi dan Dati II.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di provinsi Gorontalo dalam konteks perekonomian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) yang menerapkan kebijakan pemekaran wilayah. Di samping itu isu kesenjangan ekonomi antar wilayah juga banyak terjadi di kawasan timur Indonesia yang berdampak pada merebaknya isu disintegrasi bangsa. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari sumber-sumber yang kredibel. Di samping itu untuk mendukung kedalaman analisis penelitian ini juga mempertimbangkan hasil-hasil kajian dan penelitian lain yang relevan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi dan kompilasi data yang diperoleh dari berbagai sumber data dan laporan realisasi pembangunan daerah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Bappeda dan kantor-kantor dinas yang terkait.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah yaitu:

1. Analisis Kesenjangan Investasi
2. Analisis Regresi dan Korelasi
3. Analisis Kesenjangan Fiskal
4. Analisis SWOT

#### (1). Analisis kesenjangan investasi

$$r = (I_i - I)^2 \times \frac{f_i}{n} \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana:

- r = Tingkat ketimpangan investasi di provinsi – i
- I<sub>i</sub> = Nilai investasi di provinsi – i
- I = Nilai investasi total
- f<sub>i</sub> = Jumlah penduduk di provinsi – i
- n = Jumlah total penduduk

#### (2). Analisis Regresi dan Korelasi

Analisis regresi untuk mengetahui pengaruh perubahan variabel kurs dan tingkat bunga terhadap tingkat investasi di provinsi – i :

$$I_i = \alpha_0 + \alpha_1 r + \alpha_2 \text{Kurs} \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana:

- I = PMA dan PMDN
- r = Tingkat bunga simpanan
- Kurs = Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS

#### (3). Analisis kesenjangan fiskal

$$KF = 1 - \left( \frac{TR_{sp} + TR_{gp} + REV_{sh} + B}{EXP} \right) \dots\dots\dots(3.3)$$

Dimana:

- KF = Ketimpangan fiskal
- TR<sub>sp</sub> = Dana alokasi khusus (DAK) untuk periode setelah otonomi
- TR<sub>gp</sub> = Dana alokasi umum (DAU) untuk periode setelah otonomi
- B = Pinjaman daerah
- REV<sub>sh</sub> = Bagi hasil pajak (BHP) dan bagi hasil bukan pajak (BHBP)
- EXP = Total pengeluaran APBD

Formula lain untuk menghitung kesenjangan fiskal adalah:

$$V = 1 - [(G1 + G2) / E] \dots\dots\dots(3.4)$$

$$V1 = 1 - [(G1 + G2 + B) / E] \dots\dots\dots(3.5)$$

Dimana :

- G1 = Dana alokasi umum (DAU) untuk periode setelah otonomi
- G2 = Dana alokasi khusus (DAK) untuk periode setelah otonomi
- B = Pinjaman daerah
- E = Total pengeluaran APBD

### Metode Uji Statistik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis pada estimasi nilai parameter, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik regresi berupa uji normalitas, uji otokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik untuk memperoleh hasil estimasi nilai parameter yang memenuhi persyaratan BLUE (*best, linear, unbiased, estimator*).

#### 1. Uji Otokorelasi

Adanya gejala otokorelasi pada hasil estimasi maka parameter estimasi tetap *unbiased* dan *consistent* tetapi *standar error*nya akan bias sehingga uji statistiknya tidak tetap dan interval kepercayaan yang bias (*biased confidence intervals*). Ada beberapa faktor penyebab terjadinya otokorelasi yaitu:

- a. Kelambanan fenomena ekonomi (*inertia*)
- b. Bias spesifikasi pada kasus menghilangkan suatu variabel
- c. Bias spesifikasi pada kasus pembentukan model fungsional yang tidak tepat
- d. Permasalahan data beda kala (*lags*)
- e. Permasalahan manipulasi data

#### 2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian adanya gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji *White Heteroscedasticity*. Ada beberapa faktor yang menimbulkan permasalahan heteroskedastisitas :

- a. *Error learning model*
- b. Manipulasi dalam pengumpulan data

c. Kesalahan spesifikasi model

### 3. Uji Multikolinearitas

Diantara uji asumsi klasik yang hampir tidak bisa dihindarkan dalam suatu proses regresi dan korelasi data runtut waktu (*time series*) adalah permasalahan multikolinearitas. Namun yang harus dihindari adalah terjadinya gejala multikolinearitas secara sempurna menurut *Klein's rule of thumb* yaitu manakala korelasi antar variabel independen nilainya  $\geq 0,75$ .

### **Analisis Hasil Perhitungan**

Metode analisis hasil penelitian dan pembahasan dilakukan dalam perekonomian di propinsi Gorontalo dalam konteks perekonomian di provinsi di kawasan timur Indonesia (KATIMIN). Pembahasan dimulai dengan menjelaskan gambaran obyektif daerah, permasalahan ekonomi yang dihadapi dan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Analisis hasil penelitian diarahkan pada permasalahan riil perekonomian daerah yang menerapkan kebijakan pemekaran wilayah dengan menggunakan alat dan metode Analisis *SWOT*, *Critical Success Factor (CFS)*, *Analisis Location Quotient (LQ)*, *Analisis Shift-Share*, *Analisis Typologi Klassen*, *Analisis Kesenjangan Investasi*, *Analisis Regresi* dan *Analisis Kesenjangan Fiskal*. Dari hasil analisis tersebut dapat dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pemekaran wilayah dan implikasinya bagi perekonomian daerah.

### **Analisis Perekonomian di Provinsi Gorontalo**

Provinsi Gorontalo merupakan pemekaran dari propinsi Sulawesi Utara yang terletak di jazirah utara pulau Sulawesi dan merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang terletak di utara garis katulistiwa. Berdasarkan UU No. 38 tahun 2001 bahwa propinsi Gorontalo ditetapkan sebagai propinsi ke-32 lepas dari propinsi Sulawesi Utara. Batas wilayah provinsi Gorontalo adalah sebelah utara laut sulawesi, samudera pasifik dan Republik Philipina, sebelah timur dengan propinsi Sulawesi Utara, sebelah selatan Teluk Tomini dan sebelah barat propinsi Sulawesi Tengah. Gorontalo menurut sejarah telah ada sejak 400 tahun yang lalu dan merupakan kota tertua disamping kota Makasar, Pare-pare dan Manado. Sejak awal berdirinya Gorontalo menjadi pusat penyebaran agama Islam di Indonesia timur yaitu dari Ternate, Bone dan Gorontalo. Sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Gorontalo telah memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 23 Januari 1942. Setelah Indonesia merdeka maka rakyat Gorontalo menyatakan diri bergabung dengan NKRI.

Wilayah provinsi Gorontalo meliputi daratan dan lautan dimana sebagian besar wilayah dataran terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit yang diselingi lembah yang membentuk dataran. Luas propinsi Sulawesi Utara 12.215,45 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam beberapa daerah kabupaten/kota. Wilayah propinsi Gorontalo terletak pada ketinggian 0 – 2400 m dpa dengan jumlah pulau-pulau kecil yang mengitarinya sebanyak 67 buah. Propinsi ini mempunyai garis pantai sepanjang 590 km dengan luas teritorial 10.500 km<sup>2</sup> dan luas daerah zone ekonomi eksklusif (ZEE) 40.000 km<sup>2</sup>. Wilayah propinsi Gorontalo ada pada mulut laut Pasifik yang menghadap negara Korea, Jepang dan Amerika latin. Wilayah ini sangat strategis ditinjau dari aspek pengembangan ekonominya karena terletak di antara 2 daerah kawasan pembangunan terpadu (KAPET) yaitu Batui di Sulawesi Tengah dan Bitung – Manado di Sulawesi Utara.

Kondisi geografis ini membuka peluang cukup besar bagi daerah Gorontalo untuk berkembang karena dilalui lalu lintas barang dan manusia dari berbagai wilayah pertumbuhan.

Iklim di wilayah Gorontalo secara garis besar ada dua macam yaitu kemarau dan penghujan jadi termasuk daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Curah hujan terjadi pada bulan Maret, Mei dan Oktober tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara 207,77 mm dan jumlah hari hujan 90 – 139 hari. Suhu udara rata-rata 23 - 31<sup>0</sup> C. Tekanan udara berkisar 11.21.5 MOB dengan kecepatan angin rata-rata 1,9 knot.

### Keadaan Ekonomi

Struktur perekonomian di propinsi Gorontalo ditinjau dari kontribusi sektor-sektor ekonomi lebih banyak di topang oleh sektor industri dan jasa. Sedangkan peranan sektor pertanian relatif stabil. Tabel berikut menjelaskan struktur ekonomi propinsi Gorontalo:

Tabel 1  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Gorontalo  
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000  
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun			
	2003	2004	2005	2006
Pertanian	557.678	575.307	618.182	667.260
Pertambangan dan Penggalian	16.871	17.438	19.122	21.274
Industri Pengolahan	175.163	184.178	192.882	181.447
Listrik, Gas dan Air Bersih	10.546	11.804	12.446	12.640
Bangunan	136.057	142.126	149.000	167.512
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel	262.173	268.830	281.981	301.344
Pengangkutan dan Komunikasi	152.938	187.254	204.781	224.738
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	148.773	178.719	172.323	185.139
Jasa-jasa	308.990	326.106	377.007	414.462
Jumlah	1.769.188	1.891.763	2.027.723	2.175.816

Sumber: BPS, Gorontalo dalam Angka, 2007

Angka pada tabel di atas menunjukkan bahwa struktur ekonomi di Gorontalo didominasi sektor pertanian (30 %) dan jasa (20,9 %). Pengembangan sektor agribisnis menjadi andalan utama propinsi ini, mengingat kondisi alam dan kultur masyarakat yang paham betul mengenai bagaimana potensi dan pengembangan sektor agribisnis. Pengembangan sektor pertanian juga dikaitkan dengan peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui industri pengolahan produk pertanian seperti jagung sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dalam mengembangkan sektor pertanian ini. Sektor jasa juga menjadi andalan dari propinsi Gorontalo terutama pengembangan sektor pariwisata dan sektor-sektor lain yang terkait seperti hotel, rumah makan, dan jasa transportasi. Keadaan ini bisa dimaklumi mengingat Gorontalo – seperti halnya propinsi Sulawesi Utara – merupakan salah satu daerah tujuan wisata andalan khususnya wisata bahari. Pada tahun 2004 kontribusi sektor jasa sebesar 20,92 % dan tahun 2005 meningkat tajam menjadi 26,31 %. Pada tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan yaitu sebesar 24,95 % pada tahun 2006 dan 24,84 % pada tahun 2007.



Secara umum kebijakan pemekaran wilayah menjadi propinsi baru ke-32 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Keadaan ini bisa dibuktikan secara langsung melalui angka-angka dalam PDRB yang terus meningkat pasca kebijakan pemekaran wilayah. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2000 menunjukkan kinerja yang positif dimana pada tahun 2003 sebesar Rp. 1.769.188 juta kemudian pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 1.891.763 juta. Bahkan pada tahun 2006 dan 2007 meningkat tajam menjadi Rp. 2.027.723 juta dan Rp. 2.175.816 juta. Fenomena ini memberikan bukti konkrit mengenai keberhasilan kebijakan pemekaran wilayah bagi daerah-daerah lain bahwa kebijakan ini menjadi terobosan strategis dalam mendorong potensi ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada data tabel di atas juga menunjukkan bahwa kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih paling kecil dibandingkan sektor-sektor lainnya disamping sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2003 kontribusi sektor listrik, gas dan air minum sebesar Rp. 10.546 juta kemudian pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 11.804 juta. Keadaan ini memberikan sinyal bagi pengambil kebijakan di daerah dan pusat bahwa persoalan infrastruktur menjadi hal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Salah satu pertimbangan para investor adalah ketersediaan infrastruktur untuk menunjang pengembangan sektor industri pengolahan.

### Investasi di Gorontalo

Aktivitas investasi di Gorontalo mengalami pasang surut pasca kebijakan pemekaran wilayah. Nilai investasi bisa dilihat dari besarnya investasi menurut sektor-sektor ekonomi dan juga bisa dianalisis berdasarkan sifat atau asal investasi yang telah disetujui pemerintah baik PMDN maupun PMA. Nilai PMDN yang telah disetujui pemerintah di propinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2  
 Nilai Investasi PMDN yang Disetujui Pemerintah di Gorontalo  
 (Milyar rupiah)

Tahun	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Investasi	-	1709.4	-	-	0.7	-	-	-

Sumber: BPS, Indikator Ekonomi

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai investasi PMDN yang disetujui pemerintah dari tahun 2000 sampai tahun 2006 kurang menguntungkan. Nilai investasi PMDN pada tahun 2001 sebesar Rp. 1.709,4 milyar namun pasca kebijakan pemekaran wilayah pada tahun 2001 iklim investasi di Gorontalo benar-benar kurang memuaskan. Hampir tidak ada investor daerah yang berinvestasi di Gorontalo kecuali pada tahun 2004 yang nilainya sebesar Rp. 0,7 milyar. Keadaan ini menyiratkan bahwa kebijakan pemekaran wilayah benar-benar menimbulkan persoalan dalam upaya mendorong investasi di Gorontalo khususnya investasi PMDN. Ada beberapa kemungkinan mengapa investasi PMDN pasca kebijakan pemekaran wilayah di Gorontalo kurang menggembirakan yaitu (1) Selama ini kebijakan dan aturan menyangkut investasi diatur oleh pemerintah Sulawesi Utara di Manado sehingga investasi PMDN lebih banyak dikendalikan dan diarahkan di kawasan Sulawesi Utara dibandingkan ke Gorontalo, (2) Minimnya sarana dan prasarana infrastruktur penunjang investasi di Gorontalo sebagaimana

terungkap pada tabel 1 di atas. Keadaan ini dianggap kurang memberikan insentif bagi para pengusaha domestik untuk berinvestasi di Gorontalo meskipun sebenarnya potensi ekonominya cukup besar.

Tabel 3  
 Nilai Investasi PMDN yang Disetujui Pemerintah di KATIMIN  
 (Milyar rupiah)

Propinsi	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Gorontalo	0	1709,4	0	0	0,7	0	0	0
Sulawesi Utara	1487,5	533,2	127,8	165,7	374,5	470	59,4	177,5
Maluku	-	-	128,5	52,9	140,1	87,6	0	0
Maluku Utara	-	-	0	0	0	33,5	5	823,6
Papua	42,5	3137,5	176,5	995,9	44	1607,8	531,3	19.840,4
Sulawesi Selatan	28380,4	16653,7	174,2	29.239,7	393	876,1	2.407,3	3.951,1
Sulawesi Tenggara	166,9	1368,3	3182	167,1	912,4	0	2040	-
Sulawesi Tengah	262,5	1068,3	94,8	217,7	1179,3	2688,4	72	-

Sumber: BPS

Sedangkan nilai investasi PMA di Gorontalo relatif lebih positif dan stabil dibandingkan nilai investasi PMDN meskipun nilainya kecil. Tabel 4. di bawah menjelaskan perkembangan investasi PMA di Gorontalo dari tahun 2000 sampai 2007 :

Tabel 4  
 Nilai Investasi PMA yang Disetujui Pemerintah di Gorontalo  
 (Milyar rupiah)

Tahun	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Investasi	0,2	-	-	0,1	85,6	3,5	14,6	1,6

Sumber: BPS, Indikator Ekonomi

Data tabel nilai investasi PMA yang disetujui pemerintah pasca kebijakan pemekaran wilayah propinsi Gorontalo pada tahun 2000 sebesar Rp 0,2 milyar. Namun pada tahun 2001 nilai investasi PMA nihil sampai dengan tahun 2002. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran wilayah propinsi Gorontalo dari propinsi Sulawesi Utara pada tahun-tahun awal kurang menggembirakan dalam upaya mendorong investasi PMA di daerah ini. Namun pada tahun 2004 sampai tahun 2007 nilai investasi PMA relatif cukup menggembirakan. Pada tahun 2004 nilai investasi PMA sebesar Rp. 85,6 milyar artinya ada peningkatan yang cukup besar, kemudian pada tahun 2005 turun lagi menjadi Rp. 3,5 milyar dan meningkat lagi pada tahun 2006 menjadi Rp. 14,6 milyar. Fakta tersebut menegaskan bahwa kebijakan pemekaran wilayah relatif memberi dampak yang cukup bermakna dalam jangka menengah yaitu 3 – 4 tahun. Keadaan ini dimungkinkan karena adanya reformasi di bidang perdagangan dan investasi yang memberikan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi. Dari data tersebut terlihat bahwa kebijakan pemekaran wilayah propinsi Sulawesi Utara menjadi propinsi Gorontalo berdampak signifikan terhadap penurunan investasi PMA pada tahun-tahun awal tapi kemudian ada

peningkatan PMA karena adanya restrukturisasi dan reorganisasi dalam tata laksana pemerintahan.

### Analisis Kesenjangan Investasi PMDN di Gorontalo

Pemekaran wilayah propinsi Gorontalo dari propinsi Sulawesi Utara pada tahun 2001 membawa perubahan yang sangat berarti baik pada perekonomian di Sulawesi Utara maupun di Gorontalo khususnya menyangkut upaya untuk mendorong iklim investasi baik PMA maupun PMDN. Untuk mengetahui dampak kebijakan pemekaran wilayah terhadap kesenjangan investasi, maka perlu dianalisis dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$r = (I_i - I)^2 \times \frac{f_i}{n} \dots\dots\dots (4.1)$$

Dimana :

- r = Tingkat ketimpangan investasi PMDN di provinsi - i
- I<sub>i</sub> = Nilai investasi PMDN di provinsi – i
- I = Nilai investasi PMDN total
- f<sub>i</sub> = Jumlah penduduk di provinsi – i
- n = Jumlah total penduduk

Analisis kesenjangan investasi PMDN di sini adalah nilai investasi PMDN yang telah disetujui pemerintah. Analisis kesenjangan investasi PMDN di Gorontalo ditinjau dan dibandingkan dalam lingkup perekonomian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) maupun kawasan pulau Sulawesi. Analisis kesenjangan investasi PMDN di Gorontalo dalam lingkup perekonomian di kawasan pulau Sulawesi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5  
Analisis Kesenjangan Investasi PMDN Propinsi Gorontalo  
Dalam Konteks Perekonomian Sulawesi

Tahun	$I_i - I$	$(I_i - I)^2$	$f_i$	$n$	$f_i/n$	$r = (I_i - I)^2 \times \frac{f_i}{n}$
2000	-31934.1	1019786743	833600	14881371	0.056016	57124725
2001	-18305.7	335098652	845200	15095500	0.05599	18762239
2002	-3485.7	12150104	856900	15312700	0.05596	679920.89
2003	-2970.2	8822088	868800	15532700	0.055934	493451.24
2004	-2859.3	8175596.5	880900	15755900	0.055909	457091.18
2005	-4034.5	16277190	893100	15981900	0.055882	909601.4
2006	-4578.7	20964494	904100	16194200	0.055829	1170419
2007	-7802.4	60877446	915300	16409100	0.05578	3395745.4

Sumber: BPS, (diolah)

Keterangan:

- r = Tingkat ketimpangan investasi PMDN di provinsi Gorontalo
- I<sub>i</sub> = Nilai investasi PMDN yang disetujui pemerintah di provinsi Gorontalo
- I = Nilai investasi PMDN total di Sulawesi
- f<sub>i</sub> = Jumlah penduduk di provinsi Gorontalo
- n = Jumlah total penduduk Sulawesi

Hasil analisis kesenjangan investasi PMDN propinsi Gorontalo yang disetujui pemerintah menunjukkan kecenderungan berfluktuasi dari tahun ke tahun dalam konteks perekonomian di pulau Sulawesi. Kesenjangan (*gap*) investasi PMDN dilihat dalam kaitan dengan nilai investasi PMDN Gorontalo dibandingkan dengan nilai investasi di seluruh propinsi di pulau Sulawesi yang meliputi propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kesenjangan (*gap*) investasi PMDN yang disetujui pemerintah di propinsi Gorontalo dibandingkan dengan total investasi di pulau Sulawesi ditunjukkan dengan nilai pada kolom ( $I_i - I$ ). Pada tahun 2001 yaitu pada saat kebijakan pemekaran wilayah propinsi Gorontalo diadakan besarnya kesenjangan (*gap*) sebesar Rp. -18305.7 milyar. Kemudian pada tahun 2002 yaitu satu tahun pasca kebijakan pemekaran wilayah propinsi Gorontalo dari wilayah propinsi Sulawesi Utara besarnya gap menjadi Rp. -3485.7 milyar artinya bahwa kebijakan pemekaran wilayah propinsi Gorontalo dari propinsi Sulawesi Utara dalam konteks perekonomian di Sulawesi mempunyai dampak yang cukup besar dalam menurunkan kesenjangan (*gap*) investasi PMDN di Gorontalo. Penurunan kesenjangan (*gap*) investasi PMDN terus berlanjut sampai tahun 2003 dan 2004 dimana besarnya kesenjangan Rp. -2970.2 milyar dan Rp. -2859.3 milyar. Tetapi pada tahun 2007 kesenjangan meningkat tajam menjadi -7802.4 artinya investasi PMDN di Gorontalo pasca kebijakan pemekaran wilayah dalam jangka pendek dan menengah relatif kesenjangan nya menurun namun dalam jangka panjang cenderung ada peningkatan.

Untuk menjelaskan lebih jauh mengenai kesenjangan investasi di propinsi Gorontalo, maka dianalisis dengan instrumen rasio kesenjangan investasi PMDN ( $r$ ) yang mengukur besarnya investasi PMDN di propinsi Gorontalo dibandingkan dengan nilai investasi total di pulau Sulawesi dikaitkan dengan jumlah penduduk. Nilai kesenjangan investasi PMDN ( $r$ ) di propinsi Gorontalo pada saat diterapkan kebijakan pemekaran wilayah pada tahun 2001 relatif tinggi ditunjukkan dengan nilai  $r$  yang cukup besar yaitu 18762239. Pasca kebijakan pemekaran wilayah yaitu pada tahun 2002 rasio kesenjangan investasi PMDN turun menjadi 679920.89. Gejala kesenjangan terus berlanjut pada tahun 2003 sebesar 493451.24, dan tahun 2004 turun lagi menjadi 457091.18. Tetapi mulai tahun 2005 dan seterusnya ada gejala peningkatan rasio kesenjangan investasi dimana pada tahun 2005 besarnya rasio kesenjangan sebesar 909601.4 dan pada tahun 2006 naik lagi menjadi 1170419 artinya bahwa kebijakan pemekaran wilayah propinsi Gorontalo dari wilayah propinsi Sulawesi Utara dalam jangka pendek dan menengah berpengaruh terhadap penurunan kesenjangan investasi namun dalam jangka panjang ada kecenderungan peningkatan rasio kesenjangan investasi PMDN.

Untuk lebih melengkapi informasi mengenai dampak kebijakan pemekaran wilayah propinsi Gorontalo dari Sulawesi Utara, maka perlu dianalisis kesenjangan investasi PMDN propinsi Gorontalo dalam konteks perekonomian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN). Kawasan timur Indonesia (KATIMIN) di sini meliputi pulau Sulawesi, Pulau Maluku dan Maluku Utara, NTT, NTB, Papua dan Papua Barat. Tabel berikut menunjukkan besarnya nilai kesenjangan investasi PMDN di Gorontalo yang disetujui pemerintah dalam konteks perekonomian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) :

Tabel 6  
 Analisis Kesenjangan Investasi PMDN Propinsi Gorontalo  
 dalam Konteks Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN)

Tahun	$I_i - I$	$(I_i - I)^2$	$f_i$	$n$	$f_i/n$	$r = (I_i - I)^2 \times \frac{f_i}{n}$
2000	-32854	1079385316	833600	26822371	0.031079	33545714.49
2001	-23630.8	558414708.6	845200	27233200	0.031036	17330762.15
2002	-3791.1	14372439.21	856900	27650500	0.03099	445407.6114
2003	-30969.7	959122318.1	868800	28073500	0.030947	29682279.37
2004	-3043.4	9262283.56	880900	28503000	0.030906	286255.6779
2005	-5797.4	33609846.76	893100	28938700	0.030862	1037259.937
2006	-5390.8	29060724.64	904100	29341400	0.030813	895451.5172
2007	-28524.3	813635690.5	915300	29749800	0.030767	25032798.46

Sumber: BPS, (diolah)

Keterangan:

$r$  = Tingkat ketimpangan investasi PMDN di provinsi Gorontalo

$I_i$  = Nilai investasi PMDN yang disetujui pemerintah di provinsi Gorontalo

$I$  = Nilai investasi PMDN total di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN)

$f_i$  = Jumlah penduduk di provinsi Gorontalo

$n$  = Jumlah total penduduk di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kesenjangan (gap) investasi PMDN yang disetujui pemerintah di propinsi Gorontalo dibandingkan dengan keseluruhan investasi PMDN di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) yaitu pada kolom  $(I_i - I)$ . Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa kesenjangan (gap) PMDN di Gorontalo dalam konteks perekonomian di KATIMIN mengalami fluktuasi. Kesenjangan (gap) investasi PMDN pada tahun 2000 yaitu satu tahun sebelum adanya kebijakan pemekaran wilayah propinsi Gorontalo sebesar Rp. -919.9 milyar dan pada tahun 2002 yaitu satu tahun pasca kebijakan pemekaran wilayah menurun menjadi Rp -305.4 milyar artinya bahwa kebijakan pemekaran wilayah menyebabkan penurunan kesenjangan (gap) investasi PMDN pada tahun pertama. Namun pada tahun ke dua (2003) mengalami peningkatan kesenjangan yang sangat tajam menjadi Rp. -27999.5 milyar artinya dampak dari kebijakan pemekaran wilayah terhadap kesenjangan regional di Gorontalo mempunyai dampak yang besar. Tetapi kemudian pada tahun selanjutnya yaitu 2004 mengalami penurunan kesenjangan yang besar menjadi Rp. -184.1 milyar artinya kebijakan pemekaran wilayah berfluktuasi mengikuti dinamika perekonomian baik di tingkat lokal di propinsi Gorontalo maupun secara regional di kawasan timur Indonesia (KATIMIN).

Analisis kesenjangan investasi PMDN yang disetujui pemerintah di propinsi Gorontalo menjadi jelas dengan melihat rasio  $r$  yang menunjukkan kesenjangan investasi dikaitkan dengan jumlah penduduk. Rasio kesenjangan investasi PMDN di Gorontalo dalam konteks analisis kesenjangan investasi di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) sebelum diterapkannya kebijakan pemekaran wilayah pada tahun 2000 sebesar 33545714.49. Pada tahun 2002 yaitu satu tahun setelah kebijakan pemekaran wilayah propinsi Gorontalo dari propinsi Sulawesi Utara pada tahun 2000 nilai  $r$  turun menjadi 445407.6114. Namun pada tahun 2003 rasio kesenjangan investasi PMDN di Gorontalo naik tajam menjadi 29682279.37 dan pada tahun 2004 turun lagi

menjadi 286255.6779 artinya bahwa kebijakan pemekaran wilayah propinsi Gorontalo dari propinsi Sulawesi Utara mengalami fluktuasi mengikuti perubahan kondisi lokal di daerah pemekaran.

### Analisis Kesenjangan Investasi PMA di Gorontalo

Daerah pemekaran membutuhkan suntikan dana besar untuk mendorong pengembangan potensi ekonominya. Peranan investasi PMA sangat penting dalam pengembangan perekonomian Indonesia pada umumnya dan di daerah pada khususnya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi barang dan jasa, mendorong peningkatan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masuknya investasi PMA di daerah – terutama daerah pemekaran - akan menimbulkan efek berganda (*multiplier effect*) bagi pengembangan ekonomi lokal melalui transformasi teknologi, pengembangan ekonomi unggulan dan penciptaan nilai tambah perekonomian daerah. Analisis kesenjangan investasi PMA di propinsi Gorontalo ditinjau dalam konteks perekonomian di Sulawesi dan di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) mengalami dinamika yang cukup signifikan. Dalam analisis kesenjangan investasi PMA di sini adalah nilai investasi PMA yang telah disetujui pemerintah. Analisis kesenjangan investasi PMA di propinsi Gorontalo dalam lingkup perekonomian di kawasan pulau Sulawesi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7  
Analisis Kesenjangan Investasi PMA Propinsi Gorontalo  
dalam Konteks Perekonomian Sulawesi

Tahun	$I_i - I$	$(I_i - I)^2$	$f_i$	$n$	$f_i/n$	$r = (I_i - I)^2 \times \frac{f_i}{n}$
2000	-74.2	5505.64	833600	14881371	0,134455	308.4058
2001	-81.1	6577.21	845200	15095500	0,133994	368.2593
2002	-420.7	176988.49	856900	15312700	0,133536	9904.291
2003	-425.1	180710.01	868800	15532700	0,133081	10107.76
2004	-284.2	80769.64	880900	15755900	0,13263	4515.767
2005	-307.1	94310.41	893100	15981900	0,132175	5270.251
2006	-347.1	120478.41	904100	16194200	0,131683	6726.145
2007	-6208.7	38547955.69	915300	16409100	0,131189	2150206

Sumber: BPS, (diolah)

Keterangan:

$r$  = Tingkat ketimpangan investasi PMA di provinsi Gorontalo

$I_i$  = Nilai investasi PMA yang disetujui pemerintah di provinsi Gorontalo

$I$  = Nilai investasi PMA total di Sulawesi

$f_i$  = Jumlah penduduk di provinsi Gorontalo

$n$  = Jumlah total penduduk Sulawesi

Hasil analisis kesenjangan investasi PMA propinsi Gorontalo menunjukkan kecenderungan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Penelitian di atas menjelaskan mengenai investasi PMA yang disetujui pemerintah dan dalam konteks perbandingan antara investasi di Gorontalo dengan nilai

investasi PMA di seluruh Sulawesi. Kesenjangan (gap) investasi PMA dilihat dalam kaitan dengan nilai total investasi di Gorontalo dibandingkan dengan nilai investasi di seluruh propinsi di pulau Sulawesi yang meliputi propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kesenjangan (gap) investasi PMA yang disetujui pemerintah di propinsi Gorontalo dibandingkan dengan total investasi di pulau Sulawesi ditunjukkan dengan nilai pada kolom  $(I_i - I)$ . Pada tahun 2000 yaitu satu tahun sebelum kebijakan pemekaran wilayah propinsi Gorontalo dari propinsi Sulawesi Utara besarnya kesenjangan (gap) sebesar Rp -74.2 milyar. Kemudian pada tahun 2001 yaitu pada saat kebijakan pemekaran wilayah propinsi Gorontalo diterapkan besarnya gap menjadi Rp -81.1 milyar ada sedikit kenaikan. Kemudian pada tahun 2002 kesenjangan meningkat menjadi Rp. -420.7 milyar, keadaan ini menyiratkan bahwa kebijakan pemekaran wilayah di Gorontalo berpengaruh terhadap kesenjangan (gap) PMA di Gorontalo. Kondisi ini terus berjalan relatif stabil sampai tahun 2006 kemudian pada tahun 2007 meningkat tajam menjadi Rp. -6208.7 milyar. Fakta menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran wilayah relatif tidak menimbulkan pengaruh yang berarti namun dalam jangka panjang cenderung menimbulkan kesenjangan (gap) yang cukup berarti.

Untuk menjelaskan lebih jauh mengenai kesenjangan investasi di suatu daerah, maka dianalisis dengan instrumen rasio kesenjangan investasi PMA ( $r$ ) yang mengukur besarnya investasi PMA di suatu daerah dibandingkan dengan nilai investasi PMA total disuatu wilayah. Nilai rasio kesenjangan ini dikaitkan dengan jumlah penduduk di suatu wilayah dengan jumlah penduduk secara total. Rasio kesenjangan investasi PMA ( $r$ ) di propinsi Gorontalo sebelum kebijakan pemekaran wilayah pada tahun 2000 relatif cukup baik ditunjukkan dengan nilai  $r$  yang cukup kecil yaitu 308.4058. Pada saat kebijakan pemekaran wilayah propinsi Gorontalo dari Sulawesi Utara pada tahun 2001 besarnya nilai kesenjangan investasi PMA relatif stabil yaitu sebesar 368.2593. Pada tahun 2002 meningkat tajam menjadi 9904.291 artinya bahwa kebijakan pemekaran wilayah propinsi Gorontalo berpengaruh terhadap kesenjangan investasi PMA pada tahun pertama.

Analisis kesenjangan investasi PMA propinsi Gorontalo yang disetujui pemerintah dalam konteks perekonomian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) dikaitkan dengan jumlah penduduk di kawasan tersebut. Kawasan timur Indonesia (KATIMIN) dalam penelitian di sini meliputi pulau Sulawesi, Pulau Maluku dan Maluku Utara, NTT, NTB, Papua Barat dan Papua. Tabel berikut menunjukkan besarnya nilai kesenjangan investasi PMA yang disetujui pemerintah dalam konteks perekonomian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) :

Tabel 8

Analisis Kesenjangan Investasi PMA Propinsi Gorontalo  
Dalam Konteks Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN)

Tahun	$I_i - I$	$(I_i - I)^2$	$f_i$	$n$	$f_i/n$	$r = (I_i - I)^2 \times \frac{f_i}{n}$
2000	-1741.2	3031777.44	833600	26822371	0.031079	94223.20174
2001	-6710.8	45034836.64	845200	27233200	0.031036	1397685.323
2002	-708.5	501972.25	856900	27650500	0.03099	15556.31981
2003	-2288.1	5235401.61	868800	28073500	0.030947	162021.7258
2004	-829.4	687904.36	880900	28503000	0.030906	21260.04107
2005	-582.1	338840.41	893100	28938700	0.030862	10457.22061
2006	-798.1	636963.61	904100	29341400	0.030813	19626.83443
2007	-6656	44302336	915300	29749800	0.030767	1363031.958

Sumber: BPS, (diolah)

Keterangan :

$r$  = Tingkat ketimpangan investasi PMA di provinsi Gorontalo

$I_i$  = Nilai investasi PMA yang disetujui pemerintah di provinsi Gorontalo

$I$  = Nilai investasi PMA total di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN)

$f_i$  = Jumlah penduduk di provinsi Gorontalo

$n$  = Jumlah total penduduk di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kesenjangan (gap) investasi PMA di propinsi Gorontalo dibandingkan dengan investasi secara total di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) yang ditunjukkan pada kolom  $(I_i - I)$ . Nilai investasi PMA disini adalah yang disetujui oleh pemerintah. Dari tabel di atas terlihat bahwa gap investasi PMA di propinsi Gorontalo dibandingkan dengan besarnya investasi PMA secara total di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kesenjangan (gap) investasi PMA pada tahun 2000 yaitu satu tahun sebelum adanya kebijakan pemekaran wilayah propinsi Gorontalo dari propinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. -1741.2 milyar. Kemudian pada tahun 2001 berubah menjadi Rp. -6710.8 milyar artinya bahwa kebijakan pemekaran wilayah dan pada tahun ke dua (2003) mengalami peningkatan menjadi Rp. -2288.1 milyar artinya dampak dari kebijakan pemekaran wilayah terhadap kesenjangan regional berangsur-angsur berkurang seiring adanya kebijakan penunjang di daerah seperti kemudahan dalam berinvestasi dan penurunan bea dan pajak daerah. Pada tahun-tahun selanjutnya kesenjangan investasi PMA berfluktuasi mengikuti dinamika perekonomian baik di tingkat lokal di propinsi Sulawesi Utara maupun secara global di kawasan timur Indonesia (KATIMIN).

Analisis kesenjangan investasi PMA di propinsi Gorontalo dalam konteks perekonomian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) menjadi jelas dengan melihat nilai rasio kesenjangan investasi  $r$  yang menunjukkan kesenjangan investasi dikaitkan dengan jumlah penduduk. Nilai rasio kesenjangan investasi PMA di Gorontalo dalam konteks analisis kesenjangan investasi di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) sebelum diterapkannya kebijakan pemekaran wilayah pada tahun 2000 sebesar 94223.20174. Pada tahun 2001 nilai  $r$  turun menjadi 1397685.323 artinya



bahwa kebijakan pemekaran wilayah propinsi Gorontalo dari propinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan kesenjangan investasi PMA. Keadaan ini terus mengalami fluktuasi sampai tahun 2003 dan pada tahun 2004 nilai  $r$  turun tajam menjadi 21260.04107. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu dari 2005 mengalami peningkatan sangat tajam menjadi 10457.22061. Hasil penelitian ini menyiratkan bahwa dampak dari kebijakan pemekaran wilayah propinsi Gorontalo dari propinsi Sulawesi Utara dalam jangka pendek relatif belum menunjukkan pengaruh yang berarti namun dalam jangka menengah dan panjang berpengaruh cukup besar terhadap kesenjangan investasi PMA dalam konteks perekonomian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN).

Temuan menunjukkan adanya korelasi negatif antara kenaikan tingkat bunga dengan penurunan investasi PMA di Sulawesi Utara. Kondisi ini dimungkinkan karena tingkat bunga menunjukkan besarnya biaya investasi yang mempengaruhi biaya produksi dan pada akhirnya menentukan harga barang. Peningkatan bunga deposito akan meningkatkan biaya produksi sehingga akan mengurangi animo investor untuk berinvestasi di Sulawesi Utara.

Sedangkan nilai koefisien regresi variabel kebijakan boneka pemekaran wilayah menunjukkan nilai yang signifikan secara statistik. Besarnya nilai koefisien regresi variabel kebijakan pemekaran wilayah sebesar -3,6639 yang signifikan secara statistik pada  $\alpha = 10\%$ . Temuan empirik ini menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran wilayah propinsi Sulawesi Utara menjadi dua propinsi yaitu propinsi Sulawesi Utara dan propinsi Gorontalo berdampak negatif bagi iklim investasi PMA di Sulawesi Utara dengan penurunan investasi PMA sebesar 3,136%. Kebijakan pemekaran merespon negatif oleh investor asing karena memberikan image kurang menguntungkan berkaitan kepastian hukum dan persoalan administratif lainnya. Besarnya nilai konstanta sebesar 1,9746 artinya dalam kondisi yang stabil tanpa ada perubahan pada semua variabel independen, maka investasi PMA di Sulawesi Utara akan mengalami pertumbuhan sebesar 1,9746%.

Dari hasil pengamatan, wawancara dengan beberapa tokoh kunci (*key persons*) serta catatan statistik dapat diidentifikasi beberapa kekuatan yang dimiliki beberapa daerah KATIMIN seperti di Sulawesi Tenggara, Maluku Selatan, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat yaitu:

1. Tersedianya lahan pengembangan sektor pertanian dan perkebunan yang masih cukup luas.

Luas lahan merupakan faktor kunci bagi pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, sehingga usahatani untuk komoditas unggulan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Tabel pada pembahasan sebelumnya di propinsi di KATIMIN menunjukkan masih banyaknya lahan yang tidak produktif atau belum produktif yang bisa dimanfaatkan bagi pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

2. Tersedianya *supply* tenaga kerja yang memadai.

Ketersediaan tenaga kerja yang mencukupi akan mendorong pengembangan investasi di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi riil tenaga kerja di propinsi Gorontalo dan perekonomian di KATIMIN menunjukkan adanya ketidakmerataan persebaran antar propinsi dan kabupaten. Kawasan sebelah barat seperti di Sulawesi Selatan dan NTB cenderung memiliki jumlah dan kualitas SDM yang lebih banyak dari pada di sebelah timur. Sehingga kebutuhan

tenaga kerja dipenuhi melalui perpindahan penduduk antar daerah. Sebagai informasi tenaga kerja di kabupaten Kolaka propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 9  
Penduduk dan Aktivitas Ekonominya

No	Indikator	Satuan	Pomalaa	Wundulako	Kolaka
1.	Luas Wilayah	Km 2	333,82	218,38	120,03
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	22.068	15.389	25.780
3.	Kepadatan	Jiwa/km2	66,11	70,45	214,78
4.	Jumlah angkatan kerja (15-55 tahun)	Jiwa	16.766	9.397	16.973
5.	Jumlah penduduk yang telah pekerja	Jiwa	<b>6.473</b>	<b>6.743</b>	<b>9.624</b>
6.	Rasio angkatan kerja	-	0,76	0,61	0,66
7.	Pekerja sektor pertanian	%	18,12	<b>79,62</b>	36,69
8.	Pekerja sektor pertambangan	%	<b>36,09</b>	-	-
9.	Pekerja sektor perdagangan	%	-	5,59	<b>20,28</b>
10.	Pekerja sektor jasa-jasa	%	19,70	-	<b>20,28</b>
11.	Pekerja sektor industri	%	-	4,93	-
12.	Pekerja sektor pariwisata	%	-	-	-
13.	Pekerja di sektor listrik, gas, dan air minum	%	-	0,47	0,54
14.	Pekerja di sektor keuangan dan asuransi	%	0,37	-	

Sumber: Data primer (diolah)

### 3. Memiliki orientasi pasar yang baik

Kepastian pemasaran atas produk-produk propinsi Gorontalo terutama pertanian dan perkebunan merupakan daya tarik bagi para investor untuk menanam investasinya di bidang tersebut. Pemasaran komoditas unggulan di bidang pertanian dan perkebunan ada yang sebatas untuk pasar lokal, tapi ada juga yang mencakup pasar nasional bahkan internasional. Tabel berikut menjelaskan orientasi pasar beberapa produk unggulan daerah di KATIMIN :

Tabel 10

## Analisis Kestinambungan Produksi dan Kemampuan Pasarnya

No.	Jenis Komoditi	Kontinyuitas Produksi	Jangkauan Pemasaran		
			Lokal	Nas.	Inter.
1.	Kakao	Tergantung musim		✓	✓
2.	Cengkeh	Tergantung musim		✓	✓
3.	Padi	Tergantung musim	✓	✓	
4.	Gula Aren	Tergantung musim	✓		
5.	Lada	Tergantung musim	✓	✓	
6.	Rumput laut	Tidak tergantung	✓	✓	✓
7.	Mutiara	Tidak tergantung		✓	✓
8.	Ikan Laut	Tergantung musim	✓	✓	✓

Sumber: Data Sekunder

#### 4. Terselenggaranya hubungan yang baik antara investor dengan pemerintah daerah

Hubungan yang baik antara pemerintah dengan para investor dan calon investor ditandai dengan berbagai peraturan baik peraturan pemerintah pusat maupun peraturan daerah (perda) tentang investasi dan perdagangan yang memberikan berbagai fasilitas kemudahan bagi para calon investor. Banyaknya para pengusaha dan investor yang berinvestasi dan berusaha di propinsi Gorontalo mengindikasikan adanya relasi yang baik antara pemerintah dengan para pengusaha.

#### 5. Mobilitas barang dan tenaga yang baik

Secara umum aktivitas ekonomi di propinsi Gorontalo cukup berkembang yang ditandai dengan tingginya mobilitas barang dan tenaga. Kenyataan ini bisa dimaklumi jika mengingat KATIMIN merupakan tempat persinggahan dan jalur penghubung bagi daerah lainnya terutama yang melalui transportasi laut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Anwar, 1985, *Prospek dan Permasalahan Ekonomi Indonesia 1985-1986*, edisi pertama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Sinar Harapan, Jakarta
- Boediono, 1979, *Econometric Models of The Indonesian Economy for Short Run Policy Analysis*, Dissertation Ph.D, University of Pennsylvania
- Branson, William H, 2000, *Macroeconomic Theory and Policy*, third edition, Harper and Row Publisher
- Dernburg, Thomas F, 2001, *Makroekonomi*, terjemahan Muhtar, Penerbit Erlangga, edisi ketujuh, Jakarta
- Dornbusch, Rudiger dan Fischer Stanley, 2002, *Makroekonomi*, terjemahan Sitompul, Erlangga, edisi ketiga, Jakarta

- Edy Suandi Hamid, 2005, *Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (DAU) Upaya Mengatasi Ketimpangan Fiskal dalam Era Otonomi Daerah*, UII Press, Yogyakarta
- Glassburner, Bruce dan Chandra Aditiawan, 1982, *Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro*, LP3ES, edisi kedua, Jakarta
- Granger, CWJ and Newbold, Paul, 2002, *Forecasting Economic Time Series*, Academic Press, New York San Francisco London, p. 333
- Gujarati, Damodar N, 2002, *Basic Econometrics*, fifth edition, McGraw-Hill, London
- Harun Hadiwijoyo, *Sari Sejarah Filsafat Barat*, Jilid I dan II, 1980, Kanisius, Yogyakarta
- Henderson, James M, Quandt Richard E, 1980, *Microeconomic Theory a Mathematical Approach*, third edition, International Student Edition, McGraw-Hill International Book Company
- Herman Soewardi, 2000, *Roda Berputar Dunia Bergulir Kognisi Baru tentang Timbul-tenggelamnya Sivilisasi*, edisi I, Bakti Mandiri, Bandung
- Hill, Hall, 1996, *The Indonesian Economic since 1966 Southeast Asia's Emerging Giant*, Cambridge University Press, London
- IMF, *World Economic Outlook*, May, Washington DC, International Monetary Fund, 1998
- Imamudin Yuliadi, 2001, *Analisis Makroekonomi Indonesia Pendekatan IS-LM*, tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- , 2006, *Analisis Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia Periode 1990.I – 2004.IV*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung
- Insukendro, 1990, “Komponen Koefisien Regresi Jangka Panjang Model Ekonomi Studi Kasus Impor Barang di Indonesia”, *Journal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, No. 2 tahun V
- , 1992, “Pembentukan Model dalam Penelitian Ekonomi”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, tahun VII, No. 1
- , 1996, “Pendekatan Masa Depan dalam Penyusunan Model Ekonometrika : Forward-looking Model dan Pendekatan Kointegrasi”, *Jurnal Ekonomi dan Industri*, tahun kedua, edisi kedua
- , 1998, “Pendekatan Stok Penyangga Permintaan Uang : Tinjauan Teoritik dan Sebuah Studi Empirik di Indonesia”, *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XLVI, No. 4
- , “Pemilihan Model Ekonomi Empirik dengan Pendekatan Koreksi Kesalahan”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 14, No. 1
- Intriligator, Michael D, 1996, *Econometric Models, Techniques and Application*, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey USA
- Kmenta, Jan, 2000, *Elements of Econometric*, second edition, McGraw-Hill, London
- Koutsoyiannis, A, 2002, *Theory of Econometric*, second edition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey

- Lilien, David M, 1976, *Micro TSP Student Version Used's Manual Version 5.1*, Quantitative Micro Software, Irvin California
- Maddala, GS, 2001, *Introduction to Econometrics*, second edition, Maxwell Macmillan International Publishing Company, New York
- Malinvaud, E, 1999, *Statistical Methods of Econometrics*, third revised edition, North Holland Publishing Company, 737
- Mankiw, G N, *Macroeconomics*, Worth Publisher Co, New York, 2000
- M. Nasir, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nopirin, 1983, *A Synthesis of Monetary and Keynesian Approach to The Balance of Payments The Indonesian Case 1970-1979*, Ph.D disertation, Washington State University, 1983, Unpublished
- Peursen van CA, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, 1993, PT Gramedia, Jakarta
- Pindyck, Robert S and Rubinfeld, Daniel L, 1991, *Econometric Model and Economic Forecast*, International edition, McGraw-Hill Inc., third edition
- Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt, 2000, *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*, Gramedia, Jakarta
- Romer, David, *Advanced Macroeconomics*, McGraw Hill International Editions, Singapore, 2000
- Sadoulet Elisabeth and Alain de Janvry, *Quantitative Development Policy Analysis*, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1995
- Scarth, William M, 1988, *Macroeconomics An Introduction to Advanced Methods*, Harcourt Brace
- Sritua Arif, 1990, *Dari Prestasi Pembangunan sampai Ekonomi Politik, kumpulan Karangan*, Penerbit Universitas Indonesia
- Tawang Alun, *Analisa Ekonomi Utang Luar Negeri*, LP3ES, Jakarta, 1992
- Thomas, R Leighton, 1985, *Introductory Econometrics Theory and Application*, first edition, British Library Catalog in Publishing Data, Printed in Singapore
- Turnovsky, Stephen J, 1981, *Macroeconomic Analysis and Stabilization Policy*, Cambridge University Press, USA
- Tulus Tambunan, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran*, LP3ES, Jakarta, 2001
- Wihana Kirana Jaya, 1990, "Seleksi Model Permintaan Uang di Indonesia 1973-1983, *Journal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, No. 2 tahun V
- Zhaoyong Zhang, "China's Exchange Rate Reform and Its Impact on The Balance of Trade and Domestic Inflation", *Asia Pacific Journal of Economics and Business*, vol. 3 No. 2, December 1999